



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SUMTERA SELATAN**

*

**

**

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
29 APRIL–03 MEI 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IIII Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ResesMasa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk:

1. Melakukan peninjauan kegiatan smart farming dan pengelolaan sampah untuk menjadi pupuk organik (waste plant) oleh PT. Pupuk Sriwidjaja, dilanjutkan diskusi mengenai pasokan dan ketersediaan pupuk nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI;
2. Melakukan peninjauan Sarana Prasarana Kantor BPSILHK Palembang dan Diskusi dengan tema "Peran BSILHK dalam Pengendalian Perubahan Iklim FOLU Net Sink 2030 dan Target Net Zero Emission Pada Tahun 2060" di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Melakukan kunjungan dan diskusi mengenai Unit Pengolahan Ikan sebagai penyedia pangan dan lapangan kerja serta upaya pengelolaan limbah pengolahan ikan dalam rangka mitigasi kerusakan lingkungan; serta
4. Mendapatkan data dan informasi sebagai bahan pembahasan dengan Mitra Komisi IV DPR serta menyerap aspirasi dari masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah, termasuk meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI di masa persidangan yang akan datang.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Bapak Budhy Setiawan dan diikuti oleh Para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret–04 April 2024. Kunjungan Kerja dilaksanakan di:

1. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Jl. May Zen, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
2. Kantor Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang. Jl. Kolonel H. Barlian KM.6 No.5, Srijaya, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
3. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah, Head Office Pempek Beringin, Jl. Kolonel H. Barlian No.19, Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

B. GAMBARAN UMUM

Sumatera Selatan ber-ibukota di Kota Palembang yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 8 meter diatas permukaan laut. Provinsi Sumatera Selatan terletak pada posisi 1'-4' Lintang Selatan dan antara 102'-106' Bujur Timur. Luas wilayah Sumatera Selatan, adalah berupa daratan seluas 86.771,68 km². Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan empat kota. Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sekitar 17.071,33 km². Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Palembang dengan luas wilayah 352,51 km². Wilayah Provinsi Sumatera Selatan bagian utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG, selama tahun 2023 suhu rata-rata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 30,2°C, jumlah curah hujan setinggi 2.218,9 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 199 hari.

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 8,74 juta jiwa yang terdiri atas 4,45 juta jiwa penduduk laki-laki dan 4,29 juta jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,21 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,83. Kepadatan

penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 mencapai 100,76 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.840,63 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 33 jiwa/km².

Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan sebanyak 4,58 juta orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2023. Sementara untuk tingkat pengangguran Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 4,11 persen. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan. mempersiapkan usaha. merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetap tetapi belum mulai bekerja.

1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan

Di tahun 2023, luas panen padi di provinsi sumatera selatan mencapai 502,16 ribu ha dengan total produksi mencapai 2,76 juta ton GKG dan produktivitas 55,00 ku/ha. Sementara itu, produksi tanaman palawija pada tahun 2023 masing-masing adalah 826,84 ribu ton jagung dan 48,79ton kedelai. Untuk Tanaman hortikultura Sumatera Selatan memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buahbuahan. Pada komoditi sayur-sayuran, cabai besar memproduksi sebesar 29,69 ribu kuintal dan pada komoditi buahbuahan, semangka memproduksi sebesar 107,71 ribu kuintal pada tahun 2023.

Data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan bahwa hutan di Sumatera Selatan luasnya mencapai 3.385,01 ribu ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 566,62 ribu ha, konservasi seluas 511,97 ribu ha, suaka alam dan pelestarian alam seluas 256,23 ribu ha, dan hutan produksi seluas 2.050,22 ribu ha. Peternakan Pada tahun 2023 populasi sapi potong di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 305.641 ekor dengan produksi dagingnya sebesar 12.171,49 ribu kg. Kabupaten dengan jumlah produksi daging sapi terbesar adalah Kabupaten Muara Enim yaitu sebesar 1.810,38 ribu kg. Untuk produksi telur ayam petelur tercatat pada tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 221,21 juta kg. Untuk produksi

perikanan bersumber dari perikanan tangkap dan budidaya. Tahun 2023 total produksi perikanan tangkap baik dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum adalah 162 ribu ton. Sedangkan produksi dari perikanan budidaya sebesar 347 ribu ton.

2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Pupuk merupakan komponen yang sangat penting karena keberadaannya mempengaruhi produktivitas tanaman, kualitas unsur hara tanah, dan harga komoditas. Badan Pangan Nasional dalam Rapat bersama dengan Komisi IV DPR RI, menyebutkan bahwa kenaikan harga beras dan komoditas lain dipengaruhi oleh pengurangan alokasi pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk komersil/non-subsidi. Disamping itu, kami juga menerima berbagai keluhan seperti petani apel malang yang membutuhkan pupuk organik, petani singkong, tembakau, dan lainnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2023 yang lalu, Komisi IV DPR RI telah memberikan rekomendasi terkait dengan pupuk bersubsidi dimana Pemerintah harus segera menyelesaikan kurang bayar pupuk bersubsidi senilai 16,7 Triliun guna mendukung produksi pupuk Nasional, membuka 1000-1500 kios baru (pupuk komersil/non subsidi) guna mempermudah petani mengakses pupuk, serta meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian terkait dengan penambahan jumlah komoditas yang memperoleh manfaat pupuk subsidi sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah.

Menurut Ombudsman, penyaluran pupuk bersubsidi masih rawan dari penyelewengan. Hal itu dikarenakan kebijakan penyaluran pupuk subsidi sangat parsial karena perencanaan data dan pengawasannya masih lemah. Ombudsman mengusulkan agar Kementerian Keuangan membentuk kebijakan penganggaran yang lebih adil sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan proses perencanaan data.

Terkait dengan data, Komisi IV DPR RI telah merekomendasikan agar dalam menentukan jumlah alokasi pupuk subsidi, Kementerian Pertanian harus berpatokan pada data spasial. Kementerian Pertanian sendiri telah

melaporkan pada Komisi IV DPR RI pada tanggal 16 Januari 2023 bahwa Kementerian Pertanian tidak memiliki data spasial Nasional dan memerlukan anggaran 3,3 Triliun untuk pembuatan peta data spasial Nasional. Tidak adanya data spasial juga didukung dengan lemahnya anggaran pupuk subsidi. Anggaran pupuk subsidi setiap tahunnya tidak mengalami perubahan secara signifikan, yaitu sekitar 25,2 Triliun, sementara anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai 60 Triliun (untuk 3 jenis pupuk dan 9 jenis komoditas, dengan asumsi kebutuhan volume pupuk sama dengan TA 2023 dan simulasi menggunakan HPP Audited BPK TA 2022).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah Pendistribusian pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani. Penggunaan kartu tani sejauh ini tidak menjamin para petani bisa mendapatkan pupuk dengan mudah karena Ketidaksiapan sarana dan prasarana kartu tani yang menyebabkan kartu tani hilang, mesin EDC rusak, masih banyak area blank spot, lupa pin dll.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang Pusri sebagai pelopor produsen pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan kemampuan dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah.

Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia.

Penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun ekspor menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya diluar tanggung jawab pelaksanaan Public Service Obligation (PSO).

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk nasional, Pusri telah mengalami berbagai perubahan dalam manajemen dan wewenang yang sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejak tanggal 18 April 2012, Kementerian BUMN meresmikan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai nama induk perusahaan pupuk yang baru, menggantikan nama PT Pusri (Persero).

PT Pupuk Indonesia (persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali Pusri dengan kepemilikan sebesar 99,9998%. Sementara entitas pemilik akhir dari Pupuk Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki seluruh (100,00%) saham PT Pupuk Indonesia (Persero). Hingga saat ini Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri.

3. Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah fenomena global yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia di seluruh dunia. Saat ini, kita tidak bisa lagi mengabaikan dampaknya yang semakin nyata dan merusak. Dampak dari perubahan iklim ini sangat beragam, mulai dari peningkatan suhu global (yang saat ini dapat kita rasakan bersama), perubahan pola hujan, kekeringan, naiknya permukaan air laut, pola migrasi ikan dan hewan, hingga meningkatnya intensitas bencana alam. Ini bukan lagi sekadar teori, karena dampaknya yang merusak dan semakin nyata ini telah dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Namun, meski dampak perubahan iklim ini tampak menakutkan, akan tetapi Komisi IV DPR RI percaya bahwa masih ada harapan dan kesempatan apabila seluruh elemen khususnya pemerintah melakukan

langkah-langkah dan tindakan nyata dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Salah satu upaya penting dalam mengatasi perubahan iklim adalah melalui konsep FOLU Net Sink 2030 dimana sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan lainnya dengan kondisi tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 harus menjadi komitmen Pemerintah mengingat hal tersebut telah menjadi amanat di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).

Komisi IV DPR RI percaya bahwa dengan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai tujuan Pengendalian Perubahan Iklim FOLU Net Sink 2030 dan target Net Zero Emission pada tahun 2060.

4. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar, terutama di sektor perikanan mengingat negara ini merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara berupa laut. Namun, untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan yang optimal, negara ini perlu merancang strategi dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikananannya melalui pendekatan perikanan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, negara tidak boleh lagi hanya bertumpu pada peningkatan volume produksi/ekspor, akan tetapi harus berupaya secara optimal untuk meningkatkan daya saing serta nilai tambah pada produk perikanan khususnya pada produk-produk yang berbasis ekspor. Pemerintah harus berani mengurangi atau bahkan membatasi

penjualan produk perikanan berupa bahan mentah tujuan ekspor dengan mengganti produk-produk perikanan yang telah diolah guna mendapatkan nilai tambah.

Salah satu yang memiliki peranan penting dalam peningkatan nilai ekspor perikanan adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI telah berkontribusi besar tidak hanya dalam peningkatan jumlah dan nilai ekspor hasil kelautan dan perikanan akan tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Tercatat pada penerbitan SKP hingga Triwulan I terdapat 28 ribu tenaga kerja yang bekerja pada unit-unit pengolahan ikan yang tersebar di Indonesia.

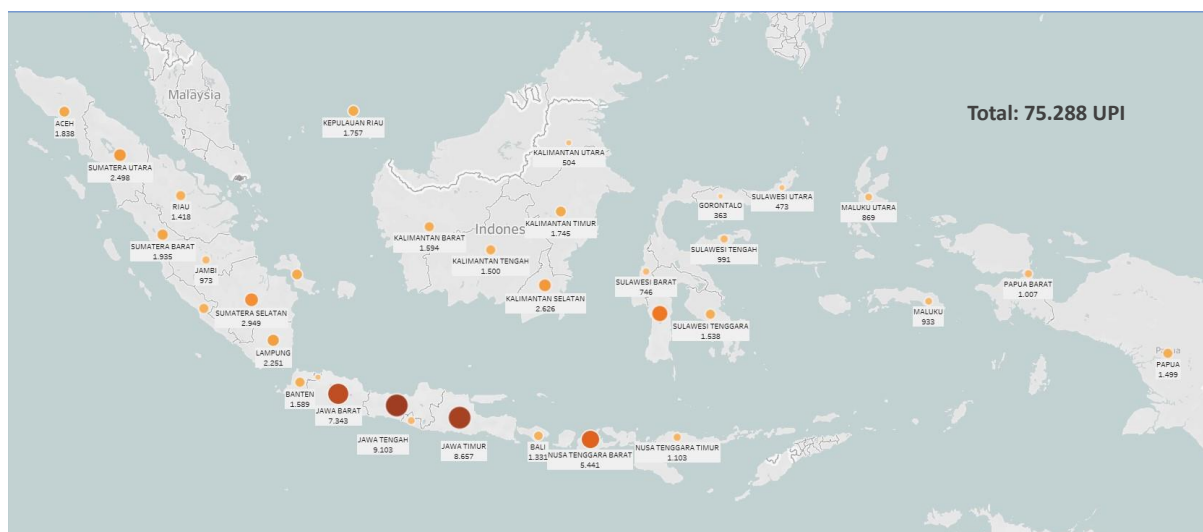
SEBARAN POPULASI UPI SKALA MENENGAH DAN BESAR TAHUN 2023



Sumber: Data Penerbitan SKP Direktorat PBM

Di sektor perikanan UPI adalah wujud dari Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia serta memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi riil di pedesaan dan daerah-daerah terpencil sampai perkotaan.

SEBARAN POPULASI UPI SKALA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2023



Sumber: Data KUSUKA 2023 diolah Direktorat PBM

Profil Unit Pengolahan Ikan di Sumatera Selatan:

- Berdasarkan data KUSUKA 2023, jumlah UPI mikro kecil sebanyak 77.467 unit sedangkan jumlah UPI menengah besar adalah 1.475 unit. Dari data tersebut, tercatat sebanyak 2.270 UPI skala mikro dan kecil di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh ragam produk perikanan antara lain: Pelumatan daging/Surimi/pempek 1.480 unit, Pengasapan 140 unit, Pengolahan Kerupuk Ikan, Keripik, Peyek Ikan 130, Penggaraman/Pengeringan 93 unit, Fermentasi/Peragian 41 unit, Penanganan produk segar 18 unit, Pembekuan 11 unit, Pemindangan 7 unit dan pengolahan lainnya 349 unit.
- Data SKP 2021-2023 mencatat 8 UPI skala menengah besar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di Kota Palembang (4), Lahat (1) Ogan Komering Ulu (2) dan Ogan Ilir (1). UPI MB tersebut bergerak di bidang pembekuan ikan, pengolahan paha kodok dan pengolahan Udang. Keberadaan UPI ini mampu menyerap sekitar 534 tenaga kerja.
- KKP melalui Ditjen PDSPKP telah memberikan bantuan cold storage yang saat ini dikelola DKP Provinsi Sumatera Selatan sejak Tahun 2013, dan telah operasional sejak Tahun 2017.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Pada saat pertemuan, dijelaskan bahwa mekanisme pennebusan pupuk bersubsidi telah mengalami perubahan. Petani harus menggunakan aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (I-Pubers) dan menunjukkan KTP asli. Untuk pennebusan pupuk bersubsidi, petani diwajibkan membawa KTP asli. Jika petani tersebut tidak bisa datang sendiri, mereka harus memberikan surat kuasa kepada orang lain. Mekanisme ini diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Dengan adanya sistem ini, jika terjadi kekurangan pupuk, penyebabnya bisa ditelusuri.

Komisi IV DPR RI menyambut baik penambahan kuota pupuk bersubsidi yang semula hanya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Penambahan tersebut mendapatkan apresiasi meskipun di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani masih diperlukan 12 juta ton. Sehingga, meskipun masih terdapat kekurangan tiga juta ton, namun dinilai peningkatan yang terjadi di tahun 2024 sudah signifikan.

Hal lain yang menjadi pembahasan adalah terkait persoalan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih tidak tepat sasaran. Tim Komisi IV DPR RI menilai sudah seharusnya dilakukan monitoring dan evaluasi data para petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi secara bertahap. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Nomor 1 tahun 2024, bahwa data petani di evaluasi sebanyak empat kali dalam satu tahun. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut mampu membantu para petani agar dapat mengefektifkan penyalurannya dan tepat sasaran.

Menanggapi hal ini, dari PT Pupuk Indonesia menekankan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2025, agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran sampai kepada para petani yang berhak mendapatkan, akan bersinergi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Hal lainnya yang menjadi sorotan adalah mengenai situasi lahan pertanian yang mengalami penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan, sehingga lahan menjadi jenuh. Pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan di atas takaran rekomendasi yang

digunakan sudah mulai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti menurunnya kandungan bahan organik tanah, rentannya tanah terhadap erosi, menurunnya permeabilitas tanah, menurunnya populasi mikroba.

Tim Komisi IV DPR RI menilai, salah satu solusi untuk mengembalikan pH dan kesuburan tanah terhadap lahan-lahan yakni bagaimana mau tidak mau, pergeseran dari pupuk anorganik ke pupuk organik guna memberikan hasil pertanian yang lebih baik. Penggunaan pupuk organik dinilai merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah serta menjaga agar struktur tanah dan kelembaban tanah bisa dipertahankan. Namun demikian, pupuk organik yang dilakukan harus yang berkualitas, jangan sampai terulang kembali permasalahan di masa lampau dalam penggunaan pupuk organik, dimana antara anggaran yang dikeluarkan oleh Negara tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaan dalam hal ini PT Pupuk Sriwijaya mengembangkan kerja sama dengan perusahaan pupuk organik skala kecil, dimana perusahaan bertindak sebagai pendamping dan Pembina sehingga produksi masyarakat dapat dioptimalkan.

Pada saat yang bersamaan, Tim Komisi IV DPR RI juga meninjau pengelolaan sampah (waste plant) dan lokasi budi daya pertanian menggunakan teknologi smart farming PT Pupuk Sriwijaya. Pada saat kunjungan, Tim Komisi IV DPR RI meminta agar dilakukan pengembangan bank sampah dengan melibatkan masyarakat lebih luas. Selain itu, dalam pengembangan smart farming juga harus dihitung efisiensinya serta meminta agar teknologi yang digunakan di simplifikasi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara umum Tim Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah PT Pupuk Sriwijaya dan agar dikembangkan, serta menjadi percontohan dan adaptasi oleh masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya.

Pada saat diskusi juga muncul pertanyaan berkaitan langkah Perum Bulog ketika beras yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, mengingat pada saat kunjungan sudah merupakan waktu panen basah di

beberapa daerah. Hal ini ditanggapi oleh Perum Bulog untuk memprioritaskan pengadaan Dalam Negeri. Tim Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi dari Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Sumatera Selatan mengalami kehilangan lahan baku terluas, dan meminta agar disampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk menetapkan lahan baku sawah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kunjungan Kerja ke Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang didapatkan beberapa informasi dan aspirasi di antaranya:

- a. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) lahir dari visi menghadapi tantangan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).
- b. Dengan UUCK. Pendekatan pembangunan bergeser secara simultan pada kekuatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu concern UUCK adalah “Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha”
- c. Dua hal besar yang diusung oleh UUCK, di satu sisi mempercepat ekonomi tumbuh, di sisi lain memastikan kualitas lingkungan dan hutan tetap terjaga.
- d. Standar menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kepastian pengelolaan dampak lingkungan.
- e. Standardisasi Instrumen LHK adalah sebuah rancangan instrumen kerja yang digunakan dalam rangka mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kecukupan luasan hutan.
- f. BSILHK hadir untuk menegaskan bahwa UUCK dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan dan hutan.
- g. Landasan Kerja BSILHK:
 - 1) Undang-undang:

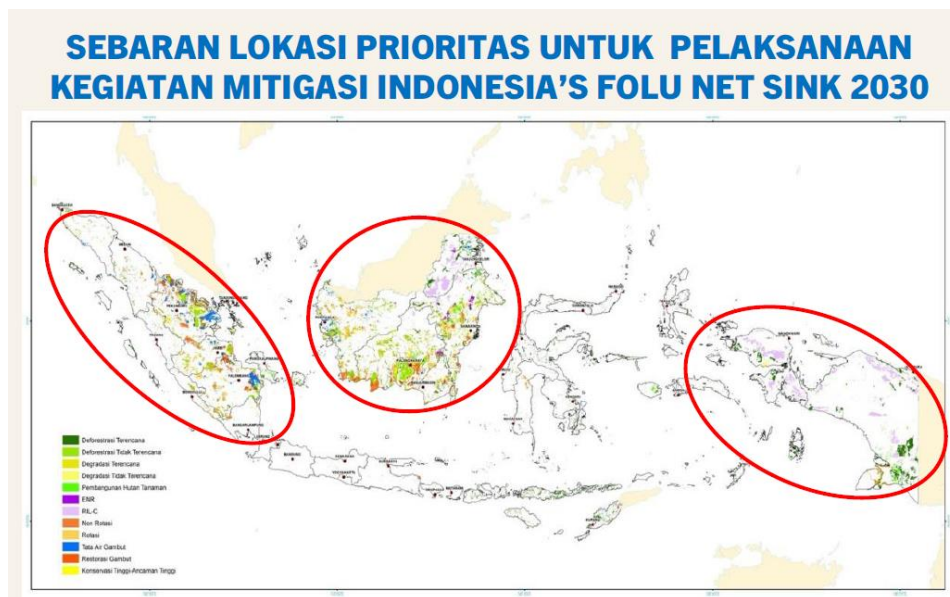
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 2) Peraturan Pemerintah:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
 - 3) Peraturan Presiden:

Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian LHK.
 - 4) Peraturan Menteri LHK:
 - a) Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b) Peraturan Menteri LHK No. 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen LHK.
 - 5) Keputusan Menteri LHK:
 - a) Keputusan Menteri LHK Nomor SK.264/MENLHK/Setjen/Kum.1/3/2023 tentang Peta Proses Bisnis Level 1-4 Lingkup KLHK.
 - b) Keputusan Menteri LHK Nomor 163 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Standar Khusus Alur Kerja, Output dan Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- h. Permasalahan Perubahan Iklim
- | | |
|---|---|
| 1) Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan. | 4) Masalah produktivitas tanaman pangan. |
| 2) Anomali iklim (peningkatan El-Nino dan atau La-Nina), Iklim Ekstrim. | 5) Tidak mendukung kehidupan. |
| 3) Peningkatan tinggi permukaan air laut. | 6) Masalah bencana alam (keke-
ringan, banjir, angin). |
| | 7) Ancaman kehidupan. |
| | 8) Hilangnya daratan. |

- 9) Kelangkaan Water, Energi, dan *Food* (WEF).
- 10) Penurunan keanekaragaman hayati.
- 11) Kerusakan infrastruktur.
- 12) Resiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan bagi masyarakat.

i. Ruang Lingkup Indonesia's FOLU NET SINK 2030



j. Capaian FOLU NET SINK 2030 ditentukan oleh:

- 1) Pengurangan emisi dari DEFORESTASI dan LAHAN GAMBUT (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut);
- 2) Peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan DEGRADASI dan meningkatkan REGENERASI);

- 3) Restorasi dan perbaikan tata air gambut;
 - 4) RESTORASI dan REHABILITASI HUTAN (pengayaan tanaman/ peningkatan serapan karbon);
 - 5) Pengelolaan hutan lestari;
 - 6) Optimasi lahan tidak produktif untuk pembangunan Hutan Tanaman dan Tanaman Perkebunan.
- k. Peran BSILHK dalam Pelaksanaan FOLU Net Sink 2030
- 1) Menyusun standar dan menetapkan pedoman yang dibutuhkan;
 - 2) Sosialisasi Pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 di Tingkat Nasional dan Sub Nasional (termasuk di Sumatera Selatan);
 - 3) Mendampingi sub nasional dalam menyusun rencana kerja Tingkat sub nasional (sebagai Ketua I Tim Pelaksana Penyusunan Renops FOLU Sumsel);
 - 4) Melaksanakan monitoring dan mengikuti perkembangan kebijakan yang menonjol dan memerlukan penelaahan/penyesuaian.
- l. Standar BSILHK Mendukung FOLU Net Sink 2030 & Target Zero Emission 2060
- 1) Standar pelaksanaan kegiatan/aksi mitigasi
 - a) Standar persemaian permanen;
 - b) Standar bibit tanaman hutan; pembibitan tanaman hutan secara generatif dan vegetatif;
 - c) Standar sumber benih;
 - d) Standar media bibit tanaman hutan;
 - e) Standar dokumentasi benih bibit;
 - f) Standar pengujian benih tanaman hutan;
 - g) Standar mutu fisik dan fisiologis benih tanaman hutan;
 - h) Standar pembangunan Areal Sumber Daya Genetik
 - i) Standar pengelolaan pariwisata alam;
 - j) Standar pengelolaan hutan produksi lestari;
 - k) Standar pengelolaan hutan lindung lestari;
 - l) Standar khusus pengelolaan hutan oleh masyarakat;

- m) Standar khusus agroforestri;
- n) Standar alat pemadam kebakaran hutan;
- o) Standar konservasi tanah dan air (KTA) untuk penanggulangan degradasi lahan;
- p) Standar penilaian jasling;
- q) Standar hasil hutan kayu;
- r) Standar hasil hutan bukan kayu
- s) Standar Menara Pemantau Api dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lahan Mineral (KBPI);
- t) Standar Embung Air dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lahan Mineral (KBPI);

- 2) Standar penghitungan capaian pengurangan emisi
 - a) Standar perhitungan cadangan karbon hutan
 - b) Standar perhitungan emisi pada RIL;
 - c) Standar Tata Cara Penghitungan Penurunan Emisi dari Kegiatan Pembalakan Berdampak Rendah (Reduced Impact Logging/RIL);
 - d) Standar Tata Cara Penghitungan Penurunan Emisi dari Kegiatan Silvikultur Intensif (SILIN);
 - e) Standar Penghitungan Penurunan Emisi dan/atau Peningkatan Serapan Gas Rumah Kaca Untuk Pelaksanaan Indonesia's FOLU Net Sink 2030;
 - f) Standar Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030;
 - g) Standar Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca Tier 3 Pada Kebakaran Gambut;
 - h) Standar penghitungan pengurangan emisi dari berbagai aktifitas mitigasi.
 - i) Dalam aktivitas ekspor/impor, saat ini telah diberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) untuk mengestimasi besaran jumlah carbon yang digunakan dalam memproduksi barang tertentu.
 - j) Terdapat 4 lembaga yang telah mendapatkan akreditasi pemerintah untuk dapat melakukan verifikasi/validasi serta mengeluarkan sertifikat kepada perusahaan yang memiliki carbon kredit.

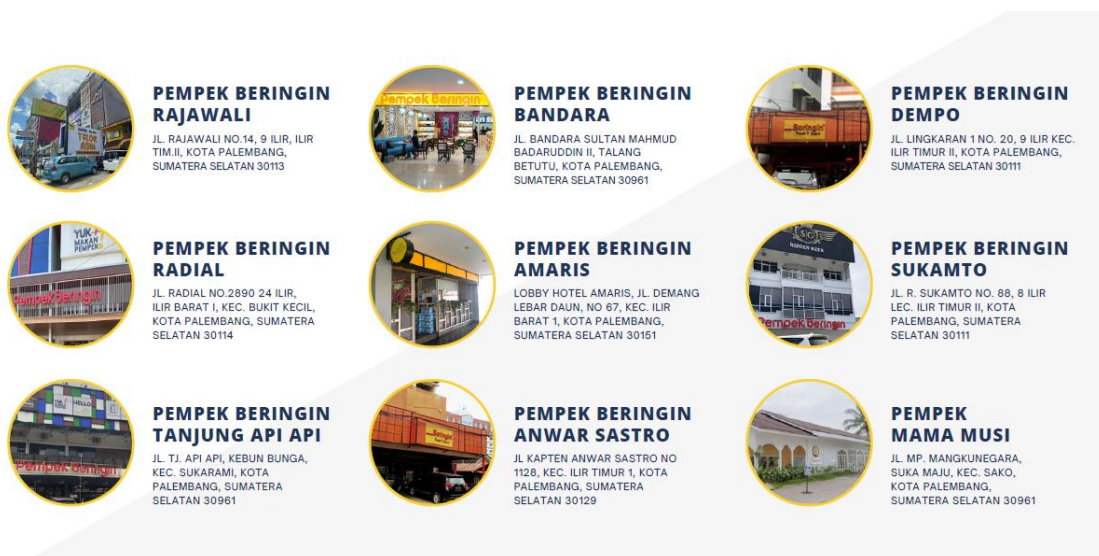
3. Kunjungan Kerja ke Unit Pengolahan Ikan Pempek Beringin

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Unit Pengolahan Ikan Pempek Beringin didapatkan beberapa informasi dan aspirasi diantaranya:

- a. CV Pesona Musi (Pempek Beringin) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang olahan makanan khas Palembang (pempek) berdiri sejak Tahun 2015 dan beralamatkan di Jl. Kolonel H. Barlian No.19, Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. CV

Pesona Musi hingga saat ini telah memperkejakan tenaga kerja berjumlah 235 karyawan.

- b. CV PESONA MUSI memiliki tempat produksi sendiri dan memiliki standar produksi yang tersertifikasi oleh HACCP, SNI, HALAL, izin edar dari BPOM. Dengan semua sertifikasi yang telah diperoleh, CV PESONA MUSI berharap dapat memberikan jaminan dan bahan dan makanan yang premium dan berkualitas tinggi untuk masyarakat.
- c. CV PESONA MUSI memiliki beberapa produk antara lain: adaan, pempek kulit, pempek kapal selam, lenjer kecil, pempek telur kecil, celimpungan, tekwan dan laksan. Bahan baku yang digunakan adalah Ikan Tenggiri dan Ikan Gabus yang diperoleh dari supplier di daerah Sumatera Selatan. Pada kondisi *high demand* produksi bisa mencapai 750 kg/hari, namun pada kondisi *low demand* produksi harian sekitar 200 kg.



- d. Untuk produk makanan beku (frozen food) terdapat dua jenis kemasan yaitu vakum biasa dan vakum kotak. Kemasan vakum frozen keduanya dapat menjaga ketahanan produk hingga 1 tahun jika disimpan dalam freezer dengan suhu -18° C dan kemasan dalam kondisi baik. Produk dengan kemasan vakum juga memiliki desain yang menarik, simple, dan siap untuk dimasak. Untuk menjamin kualitas produknya, CV Pesona Musi telah memiliki berbagai sertifikat keamanan pangan seperti SKP, HACCP, MD, SNI dan Halal. Untuk mendukung pemasarannya perusahaan ini sudah memiliki 7 Outlet di Sumatera Selatan.

- e. Kendala yang dihadapi oleh CV Pesona Musi adalah belum adanya pengembangan teknologi pangan. Salah satunya diperlukan standarisasi dan teknologi yang dapat memperpanjang masa simpan produk pempek sehingga bisa didistribusikan dalam lingkup yang lebih luas.
- f. Industri pengolahan ikan seperti Pempek yang menjadi salah satu ciri khas Palembang ini masih kekurangan pasokan dua jenis ikan yang sering digunakan sebagai bahan baku pempek, yaitu ikan belida dan tenggiri. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk membantu memenuhi suplai bahan baku produksi pempek di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang sehingga kontinuitas produksi usaha pengolahan ikan ini dapat terjamin.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Tim Komisi IV DPR RI meminta agar penyaluran pupuk subsidi yang mengalami peralihan mekanisme sudah selesai dalam memadupadankan data. Sehingga petani bisa betul-betul hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa melakukan tebus pupuk.
- B. Tim Komisi IV DPR RI juga meminta kepada seluruh pihak terkait agar dapat memberikan sosialisasi terhadap para petani terkait pencairan pupuk bersubsidi agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari.
- C. Tim Komisi IV DPR RI meminta agar dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya menggunakan sistem T-Pubers ke aplikasi iPubers yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia bisa memperbaiki sistem pendistribusian. Selanjutnya Tim Komisi IV DPR RI meminta agar jangan sampai ada kebijakan yang tumpang tindih dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
- D. Komisi IV DPR RI mendukung adanya peningkatan atau penambahan anggaran kepada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar Pengendalian Perubahan Iklim FOLU Net Sink 2030 dan Target Net Zero Emission Pada Tahun 2060 dapat tercapai.
- E. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk komitmen dan segera melakukan aksi-aksi nyata terhadap pengendalian perubahan iklim mengingat dampak perubahan iklim saat ini sudah semakin terasa dan terbukti secara nyata.

- F. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada CV Pesona Musi yang telah mentaati aturan pemerintah dengan memenuhi perizinan dan sertifikasi yang diwajibkan serta menghasilkan produk-produk yang bermutu baik.
- G. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh CV Pesona Musi terkait teknologi yang dapat memperpanjang masa simpan produk pempek sehingga produk pempek Palembang bisa didistribusikan dalam lingkup yang lebih luas.
- H. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar memperbanyak unit-unit pengolahan ikan agar produksi perikanan yang dihasilkan mendapatkan nilai tambah serta dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- I. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk memastikan kebutuhan bahan baku pempek di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang dapat terpenuhi agar kontinuitas usaha pengolahan ikan ini dapat terjamin.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2024

Ketua Tim,

Ttd.

Ir. Budhy Setiawan, M.Si.
A-290

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Kunjungan dan Diskusi di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Kunjungan dan Diskusi di Kantor Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang



Kunjungan dan Diskusi di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pempek Beringin

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

1. <https://emedia.dpr.go.id/2024/04/30/komisi-iv-apresiasi-smart-farming-dan-waste-plan-pusri-agro-edupark-palembang/>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49339/t/Legislator%20Komisi%20IV%20Soroti%20Daerah-daerah%20yang%20Sulit%20Dapat%20Pupuk%20Bersubsidi>
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49347/t/Firman%20Subagyo%20Soroti%20Penggunaan%20Pupuk%20Anorganik,%20Kurangi%20Kesuburan%20Tanah>
4. <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2024/04/29/bsilhk-punya-tugas-besar-tegas-budhy-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri/>
5. <https://emedia.dpr.go.id/2024/04/30/komisi-iv-apresiasi-smart-farming-dan-waste-plan-pusri-agro-edupark-palembang/>
6. <https://microsite.suara.com/dpr/2024/05/02/112232/penambahan-kuota-pupuk-bersubsidi-2024-jadi-95-juta-ton-diharapkan-tepat-sasaran-kepada-petani>
7. <https://lenteratoday.com/komisi-iv-dpr-tekankan-pentingnya-komitmen-kendalikan-perubahan-iklim/>
8. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49349/t/KKP+Perlu+Ciptakan+Teknologi+Budidaya+Ikan+Guna+Penuhi+Suplai+Industri+Pengolahan+Ikan>